

BAB I

PENDAHULUAN

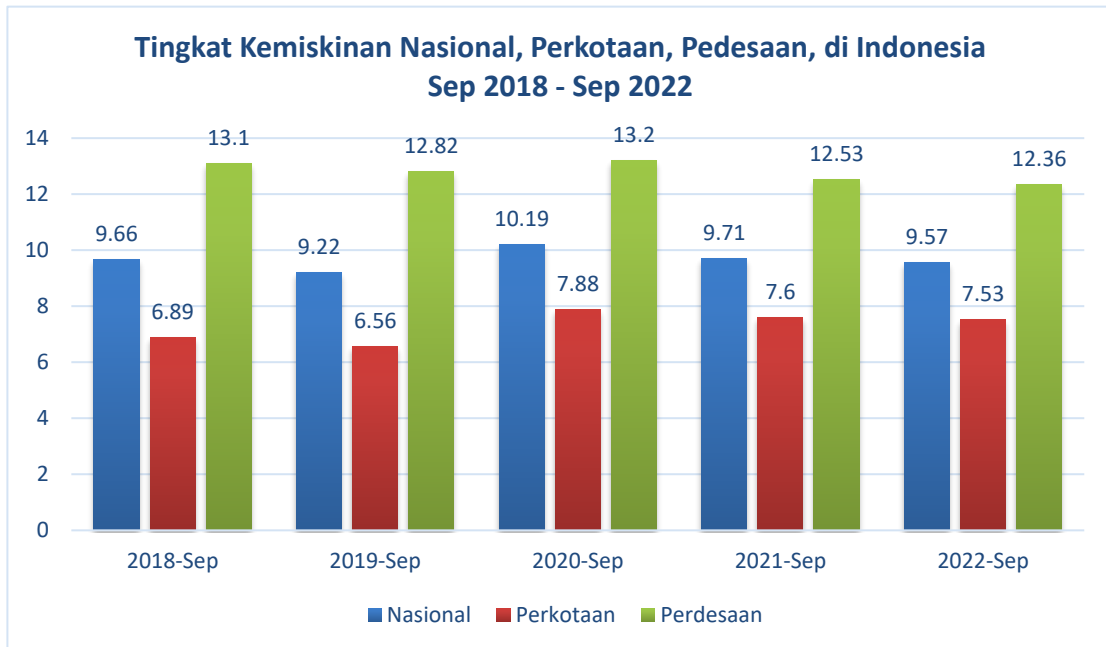
1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan Indonesia ialah sesuatu yang disebut tantangan sosial yang rumit serta penting. Kemiskinan sejak lama selalu menjadi problema. Masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan yang serius dan menjadi akibat buruk dari upaya pembangunan negara. Dampak kemiskinan meluas ke berbagai aspek mulai dari sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar ini mencakup kebutuhan akan akses pelayanan kesehatan yang memadai, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemampuan untuk memperoleh perumahan yang mencukupi, gizi yang memadai, lingkungan yang sehat, dan perasaan aman dari ancaman-ancaman yang mengancam keselamatan mereka.

Pada September 2022, Badan Pusat Statistik menetapkan IDR 486,168 per bulan adalah garis kemiskinan nasional, dengan IDR 360,007 (74,05%) dan IDR 126,161 (25,95%). Jika dilihat dari aspek wilayahnya, garis kemiskinan perkotaan ditetapkan sebesar Rp522.349 lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan pedesaan pada periode yang sama yakni Rp513.170. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat 26,36 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah tersebut, 14,38 juta orang, atau 54,55 persen, tinggal di pedesaan, yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Indonesia; individu yang tersisa tinggal di wilayah metropolitan. Menarik untuk melihat lebih dekat kesenjangan kemiskinan di kedua wilayah tersebut. Terjadinya kemiskinan di pedesaan lebih memprihatinkan dan perlu segera diatasi, berdasarkan tiga indikator pengukuran kemiskinan, yang meliputi persentase penduduk yang berada pada kehidupan kemiskinan (Head Count Index, atau P_0), grafik Kesenjangan Kemiskinan, atau P_1 , dan IKK, atau P_2 .

Berdasarkan nilai Head Count Index, persentase tingkat kemiskinan di pedesaan selama kurang lebih lima tahun terakhir selalu memperlihatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perkotaan sebagaimana

ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Grafik Data Tingkat Kemiskinan Nasional, Perkotaan, Pedesaan, di Indonesia Sep 2018 - Sep 2022

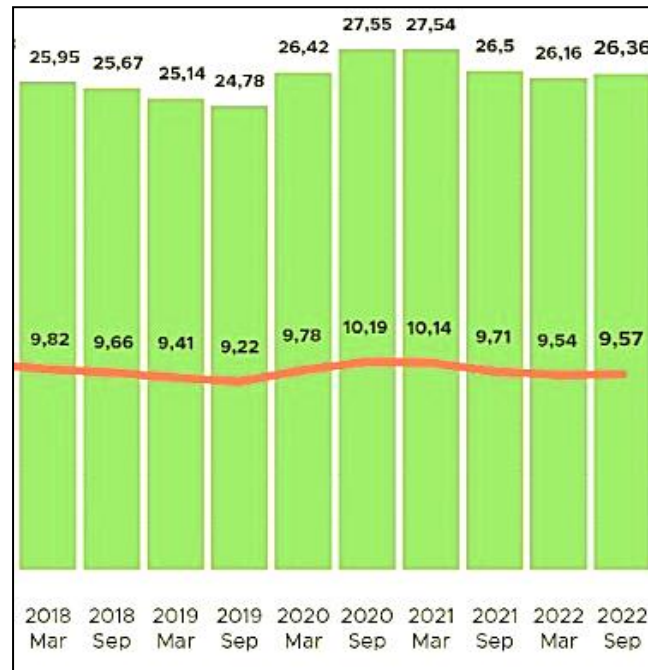
Tingkat kemiskinan nasional sejatinya merupakan insidensi antara tingkat kemiskinan perkotaan dan tingkat kemiskinan pedesaan. Tingkat kemiskinan perkotaan dari lima tahun silam selalu berada di bawah 9 persen bahkan rata-ratanya hanya 7,46 persen. Sementara tingkat kemiskinan pedesaan selalu di atas 12 persen dengan nilai rata-rata 13,16 persen. Berdasarkan data tipografi wilayah, pedesaan di Indonesia sebagian besar berada di daratan (52,89 persen) dan lereng (45,77 persen). Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka terdapat pula pedesaan yang berbatasan langsung dengan laut (14,88 persen). Mayoritas penduduk pedesaan bekerja di 5 sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan (86,48 persen). Sisanya berasal dari sektor industri dan jasa informal dengan komposisi masing-masing 4,33 persen dan 9,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2022).

Fakta di lapangan menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian mengalami trend penurunan dalam dua dekade terakhir. Sektor pertanian semestinya mampu

menjadi motor penggerak perekonomian desa tetapi keberadaannya minim perhatian pemerintah. Upah pekerja di sektor ini juga meningkat lebih lambat dari pada sektor industri/jasa di perkotaan bahkan perkembangannya fluktuatif. Ini bertolak belakang apa yang telah diungkapkan Lewis di mana upah sektor pertanian seharusnya terus meningkat dan mampu mengurangi kesenjangan upah pada saat terjadi perpindahan penduduk ke sektor kapitalis modern. Menurut hasil penelitian Foster dan Rosenzweig (2004) pertumbuhan sektor pertanian merupakan kunci mengatasi kemiskinan perdesaan. Sebab, kegiatan utama perekonomian perdesaan adalah dari pertanian. Bidang tersebut ialah yang paling terbanyak tenaga kerja serta menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini didukung oleh Suryahadi et al., (2009) dan Zaman dan Khilji (2013). Mereka sepakat bahwa pertumbuhan sektoral termasuk di dalamnya sektor pertanian dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengangguran semu (pekerja yang ada tidak menambah output pertanian) tampak dalam sektor subsiten. Wilayah perdesaan di Indonesia memiliki. Hingga Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pedesaan berada pada angka 3,43 persen. Fei-Ranis (1961) berpendapat bahwa agar pekerja di sektor pertanian dapat menghasilkan produksi melebihi gaji institusional yang mereka peroleh, maka para pengangguran di sektor tersebut harus dipindahkan ke sektor industri dengan tingkat gaji institusional yang sama. Hasil akhir dari fase-fase ini adalah kemajuan ekonomi.

BPS menggunakan pendapatan bulanan per rumah tangga sebesar Rp550.458 sebagai dasar penghitungan tingkat kemiskinan. Diperkirakan rata-rata terdapat 4,71 anggota keluarga di rumah berpendapatan rendah. Menurut pendapatan bulanan maksimum keluarga miskin adalah Rp 2.592.657 per/ rumah tangga miskin.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase tahun 2018-2022

Sumber : BPS Tahun 2022 (data sekunder diolah oleh peneliti)

Pada gambar 1.2 merupakan grafik jumlah penduduk miskin dengan presentase penduduk miskin. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah masa sebelum pandemi dimana jumlah penduduk miskin sedang mengalami penurunan sebanyak 0,44% tahun 2019 dari tahun 2018. Lalu memasuki pada tahun 2020 Indonesia mengalami permasalahan pandemi covid 19 yang mengakibatkan mobilitas ekonomi sulit berjalan sehingga presentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 0,56%. Setelah masa pemulihan pandemi covid 19 hingga tahun 2022, presentase penduduk miskin kian menurun.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, terdapat 26,36 juta jiwa atau 9,57% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada September 2022. Meski lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan September 2021 sebesar 9,71 persen, namun angka kemiskinan tersebut tumbuh sedikit dari Maret 2022 (9,54%). Batasan garis kemiskinan sebesar Rp 535.547 pada bulan September 2022 lebih tinggi 5,95% dibandingkan ambang batas sebesar Rp 505.468 pada bulan Maret 2022. Pada bulan September 2022, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami sedikit peningkatan angka kemiskinan ditinjau dari lokasi. Kemiskinan perkotaan meningkat menjadi 7,53% (naik dari 7,5% pada Maret 2022). Selain itu, proporsi penduduk miskin di perdesaan Kembali meningkat menjadi 12,36%. (Maret 2022: 12,29%)(Kemenkeu, 2023). Pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 8,5 hingga 9% pada tahun 2022. Dalam pertemuan singkat, tujuan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, menambahkan target kemiskinan pada tahun 2022 berkisar antara 8,5% hingga 9%. Persentase suatu penduduk yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 9,54%, yang menunjukkan bahwa negara ini belum mencapai tujuan pengurangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah ingin melihat penurunan angka kemiskinan sebesar 7,5%–8,5% pada tahun 2023. Segala upaya telah dilakukan, termasuk menawarkan program jaminan sosial tambahan dan bantuan keuangan langsung. Target Indonesia mencapai angka kemiskinan 9,36% pada tahun 2023 masih belum tercapai.

Mengenai tekanan inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga komoditas di seluruh dunia, khususnya pangan dan energi, akibat konflik di Ukraina. Namun, tingkat inflasi di Indonesia telah meningkat jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain, termasuk juga Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya yang mencatat rekor tertinggi dalam empat puluh tahun terakhir. Penyebab utama hal ini adalah fungsi vital APBN sebagai peredam guncangan inflasi global melalui alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan dan sistem subsidi energi. (Kemenkeu, 2023).



**Gambar 1.3 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2022**

Sumber : BPS Tahun 2023 (data sekunder diolah oleh peneliti)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia bagian timur dari provinsi Papua dengan jumlah 26,80% dan provinsi Papua Barat yaitu berjumlah 21,43% memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Sebaliknya, provinsi Bali mempunyai persentase terendah yaitu 4,53%. (BPS, 2023b). Provinsi Papua dan juga Papua Barat memiliki penduduk miskin yang paling tinggi disebabkan letaknya merupakan yang paling timur Indonesia dan keterjangkauan terhadap infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan yang sangat terbatas.

Sementara, Provinsi Bali dengan mempunyai angka kemiskinan paling rendah di antara seluruh provinsi, mampu menurunkan angka kemiskinannya pada tahun 2022 berkat sejumlah faktor, antara lain pemulihan perekonomian pulau tersebut pasca wabah Covid-19 dan dibukanya kembali lapangan kerja di negara-negara tersebut. industri pariwisata dan industri pendukungnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, pada September 2022, angka kemiskinan di pulau tersebut diperkirakan turun sebesar 0,04%. Bali memiliki 205.360 individu impor, atau 4,53% dari total populasi pulau tersebut. Dibandingkan dengan periode yang berakhir pada Maret 2022, ketika pemulihan ekonomi masih belum berjalan

maksimal, angka ini mengalami penurunan sebanyak 32.000 orang. Bali menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, yaitu 4,53%. Dibandingkan periode Maret 2022, ketika okupansi hotel masih 21%, okupansi hotel meningkat drastis menjadi 46,45%, mencerminkan kebangkitan industri pariwisata Bali yang menjadi penggerak perekonomian pulau tersebut. Angka kemiskinan menurun berkat kemampuan Pulau Dewata yang berhasil menurunkan angka kemiskinan terbuka. Berdasarkan data dari BPS, pada bulan Agustus tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali mengalami drop sebesar 0,04 persen ke 4,80 persen.

Dilihat dari grafik diatas membuktikan bahwa pembangunan di Indonesia belumlah merata, maka sebaiknya perlu dilakukan pengkaji ulang apakah program dari dalam kebijakan tersebut masih bisa dibilang layak dipertahankan atau bahkan harus diperbarukan. Ukuran kesejahteraan negara dapat dilihat dari aspek ekonomi melalui Nilai Tukar Petani penduduk, aspek ketenagakerjaan melalui tingkat pengangguran, dan aspek pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah.

Pertama, merujuk pada penelitian oleh Samaniah yang menunjukkan hasil dari penelitian menjelaskan jika terdapat hubungan negatif antara NTP dengan kemiskinan petani pedesaan di Provinsi Aceh. Artinya jika NTP naik demikian kemiskinan petani pedesaan di Aceh akan turun, serta apabila nilai NTP turun maka kemiskinan petani pedesaan di Aceh akan melambung tinggi.

Satu di antara faktor yang menjadi pengaruh kemiskinan ialah harga. Persentase dari penduduk yang hidup dalam kemiskinan meningkat akibat kenaikan harga. Hal ini terjadi akibat menurunnya nilai tukar riil pendapatan individu akibat kenaikan harga. Akibatnya, seseorang tidak dapat lagi membeli produk dan jasa dalam jumlah yang sama dengan upah yang sama. Kemampuan petani untuk memperdagangkan komoditas dan jasa yang dihasilkannya berupa barang/jasa yang digunakan baik keperluan pribadi, rumah tangga ataupun operasi produksi pertanian tercermin dalam NTP. Nilai Tukar Petani menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan petani berubah seiring berjalannya waktu. Kemampuan petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangga lainnya seperti layanan kesehatan dan pendidikan dapat terpenuhi jika NTP semakin besar, dan sebaliknya. Informasi

mengenai nilai tukar petani Indonesia tahun 2022 disajikan di bawah ini.

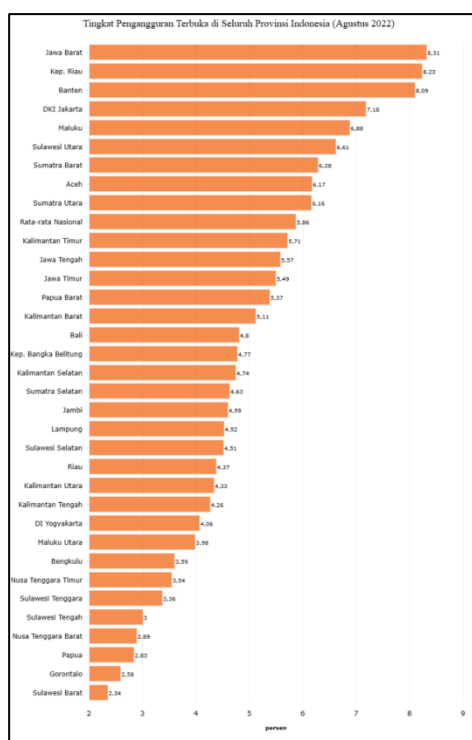
Gambar 1.4 Grafik Nilai Tukar Petani Menurut Provisnsi Tahun 2023



Sumber : BPS Tahun 2023 (data sekunder diolah oleh peneliti)

Kedua, merujuk penelitian oleh Erliza Millenia Putra dan Dewi Zaini Putra yang menunjukkan hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pengangguran terbuka ada pengaruh positif yang tak signifikan pada kemiskinan di Indonesia (Erliza Millenia Putra, Dewi Zaini Putra, 2021). Lain halnya pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Suripto & Subayil, 2020) Hubungan antara kemiskinan dan pengangguran tidak dipengaruhi oleh pengangguran karena sebagian pengangguran mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun menganggur, sebagian pengangguran tidak selalu miskin, sebagian pengangguran bekerja di perekonomian informal, dan pada masyarakat tertentu terdapat lapangan pekerjaan. dengan waktu kurang dari 35 jam yang memainkan peran penting dalam mengatasi hubungan ini. penghasilan yang terhormat. Faktor penting lainnya dalam memutuskan hubungan antara pengangguran dan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah.

Menurut BPS (BPS, 2023e), Pada bulan Agustus 2022 terjadi penurunan rata-rata TPT di Indonesia dari 6,49% pada bulan Agustus 2021 menjadi 5,86%. Hal ini menunjukkan bahwa 5,86% angkatan kerja di negara tersebut saat ini menganggur atau setengah menganggur. TPT, menurut BPS, menunjukkan kebolehan perekonomian terhadap penyerapan tenaga kerja serta membuat lapangan kerja. Dengan jumlah pasokan tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan meningkat seiring dengan nilai indikator tersebut.



Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Seluruh Provinsi di Indonesia (2022)

Sumber : Databoks Tahun 2022

Gambar 1.5 menggambarkan sepuluh provinsi mana Kalimantan Timur 5,71%, Sumatera Utara 6,16%, Aceh 6,17%, Sumatera Barat 6,28%, Sulawesi Utara 6,61%, Maluku 6,88%, Jakarta 7,18%, Banten 8,09%, Riau 8,23%, serta Jawa Barat 8,31%—memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar hingga saat ini. Agustus 2022. Wilayah Jawa Barat yang menjadi pusat industri besar antara lain Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, dan Sukabumi. Oleh karena itu, individu dari berbagai provinsi datang untuk bekerja di provinsi ini. Jelas sekali

bahwa pengusaha akan memilih pekerja yang mempunyai kompetensi lebih. Namun provinsi dengan tingkat pengangguran terbesar adalah Jawa Barat. Hal ini berbeda dengan jumlah penduduk yang berjumlah 50 juta jiwa dan jumlah pekerja sebanyak 38,67 juta jiwa. Dari jumlah penduduk, hal ini dapat dipastikan. Sebab, data yang dijelaskan merujuk pada persentase, yang secara otomatis akan memberikan hasil yang paling tinggi. Dengan demikian, persentase tersebut akan dikalikan dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, sehingga hasilnya dipastikan menjadi yang terbesar. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat juga memiliki keistimewaan lain, yaitu sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan paling banyak dan merupakan daerah dengan tingkat investasi paling tinggi di seluruh Indonesia.

Lain halnya dengan Provinsi Sulawesi Barat, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Hal ini sering terjadi di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) dan geografi (perkotaan dan pedesaan). Selain itu, Sulawesi Barat kini memiliki tingkat pengangguran terendah di seluruh Indonesia akibat penurunan TPT. Krisis lapangan kerja di Sulawesi Barat masih terus terjadi dan menjadi permasalahan sosial dan ekonomi meskipun angka pengangguran mengalami penurunan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan berkualitas dengan gaji layak, meski angka pengangguran sudah menurun. Berdasarkan Sakernas Agustus 2022, pekerja di Sulbar masih menempati jam kerja tertinggi di sektor industri pertanian.

Ketiga, merujuk penelitian oleh M Hafiz Fadhilah, M Muchtar, dan P R Sihombing yang menunjukkan hasil penelitian Variabel dari pendidikan pengaruh negatif signifikan kepada jumlah penduduk miskin. Artinya dengan peningkatan pendidikan akan menurunkan total penduduk yang miskin (Fadhilah dan Muchtar, 2023). Pendidikan berperan penting dalam memungkinkan mobilitas sosial, membuka peluang bagi individu untuk menaik ke tingkat sosial dan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan dengan demikian, membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, sehingga dapat menciptakan dampak positif dalam

mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Rata-rata lama sekolah tinggi memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran yang lebih baik tentang aspek-aspek ekonomi, kesehatan, dan gizi. Oleh karena itu, mereka dapat membuat penilaian keuangan yang lebih mumpuni dan adanya akses yang mudah pada prospek karier yang dapat terjamin dengan bergaji lebih tinggi. Orang-orang kaya lebih mampu mengatasi hambatan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka karena produksi yang lebih tinggi dan pemahaman mereka terhadap masalah kesehatan. Oleh karena itu, kunci penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan adalah pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memperbaiki sistem pendidikan dan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat. Peneliti memilih judul Analisis Nilai Tukar Petani, TPT, Pendidikan, dan Kemiskinan Indonesia Periode 2018–2022 berdasarkan penjelasan ketiga item di atas.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Analisis hubungan antara Nilai Tukar Petani dengan Kemiskinan Indonesia
2. Analisis hubungan antara Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan Indonesia
3. Analisis hubungan antara Pendidikan dengan Kemiskinan di Indonesia

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan antara Nilai Tukar Petani dengan Kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis hubungan antara Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis hubungan antara Pendidikan dengan Kemiskinan di Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Khususnya teruntuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi serta memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada pembaca sehingga berguna dalam mengembangkan penelitian selanjutnya tentang Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Untuk membantu pemerintah provinsi di Indonesia merumuskan kebijakan yang memiliki tujuan agar meningkatkan standar hidup masyarakat yang tinggal di kota dan desa—lebih khusus lagi, kualitas hidup—penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan tambahan serta informasi berharga tentang kemiskinan di negara ini. petani dalam mengurangi kemiskinan.